

FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

LIES SETYO SRI RAHAYU

NIM. 12030110120106

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Lies Setyo Sri Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120106
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE
AUDIT**
Dosen Pembimbing : Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 12 Februari 2014

Dosen Pembimbing,

(Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 197205112000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Lies Setyo Sri Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120106
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS KOMITE AUDIT**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 27 Februari 2014

Tim Penguji

1. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA., Ph.D., Akt. (.....)
3. Faisal, SE., Msi., Akt, Ph.D. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Lies Setyo Sri Rahayu, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Februari 2014
Yang membuat pernyataan,

(Lies Setyo Sri Rahayu)
NIM. 1203011012010

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Man Jadda Wajada”

Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak, Ibu serta Kakakku tercinta.

Atas doa, dukungan, dan kasih sayang kepadaku yang tak terhingga

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing the audit committee quality. The analysis used independent variable of independent commissioner, competency commissioner, commissioner activity, commissioner size, leverage, the existence of a Big Four auditor, managerial ownership, institutional ownership. And then, company size as control variable. The dependent variable is audit committee quality.

The statistic method to test the hypotheses is multiple linear regression. The sample used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (BEI) is a company's annual report in 2012. Samples were taken at random from the 403 non-financial companies. Eighty non-financial companies designated as the calculation formula Babbie.

The results of this research indicate that independent commissioner, competency commissioner, commissioner activity, commissioner size, leverage, the existence of a Big Four auditor, institutional ownership is significantly positive influence the quality of the audit committee. Furthermore, managerial ownership is significantly negative influence the quality of the audit committee. While the leverage does not have a significant influence on the quality of the audit committee.

Keywords: *audit committees, board of commissioner, leverage, the existence of a Big Four auditor, managerial ownership, institutional ownership, company size*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu, independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Kemudian, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Variabel dependen adalah kualitas komite audit.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan tahunan perusahaan pada tahun 2012. Sampel diambil secara acak dari 403 perusahaan non keuangan. Delapan puluh perusahaan non keuangan ditetapkan sebagai sampel melalui perhitungan formula babbie.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, dan kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Selain itu, kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit.

Kata Kunci: komite audit, dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT**”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan hal terbaik dengan caranya yang begitu luar biasa. Semoga penulis dapat terus berkarya, berkembang, dan menjadi kebanggaan-Nya.
2. Prof. Drs. H. Muhamad Nasir, S.E, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, S.E, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, motivasi, dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali atas bantuan, dukungan dan perhatiannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, terutama Jurusan Akuntansi atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staff dan karyawan dibagian tata usaha, perpustakaan, dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
8. Orang tua tercinta, Bapak Medi dan Ibu Yuni serta Kakaku Rinto, terimakasih atas doa yang dipanjatkan, dukungan, semangat, dan nasihat yang diberikan kepada penulis.
9. Teman dekatku dari semester satu Nanda, Ifa, Vita yang selalu sabar dan setia menemaniku selama kuliah.
10. Moi-moi MOSHA, Watek, Devi, Norma, Nurani, Raras, Winda, Vita yang telah berbagi kebahagiaan, canda, dan tawa.
11. Teman satu dosen pembimbing Fina sebagai teman diskusi dan saling berbagi informasi.
12. Geng Pattimura, Sekar Niken, Adilla, Vanessa, Niken Saras atas bantuan, kerjasama, dan kenangan tak terlupakan selama magang.
13. Teman-teman KKN Desa Ambokembang, Pekalongan: Pita, Dita, Nisti, Ayu, Mbak Dian, Ipin, Tyo, Mas Fakhtul, Mas Zainul atas kebersamaan dan kerjasamanya selama KKN.

14. Semua teman-temanku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terutama teman-teman akuntansi angkatan 2010.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 12 Februari 2014

Penulis,

Lies Setyo Sri Rahayu

12030110120106

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian..... | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA | 14 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 14 |
| 2.1.1 Teori Agensi | 14 |
| 2.1.2 <i>Good Corporate Governance</i> | 16 |
| 2.1.3 Komite Audit | 19 |
| 2.1.4 Independensi Dewan Komisaris | 23 |
| 2.1.5 Kompetensi Dewan Komisaris | 25 |
| 2.1.6 Aktivitas Dewan Komisaris..... | 26 |
| 2.1.7 Ukuran Dewan Komisaris | 26 |
| 2.1.8 <i>Leverage</i> | 27 |
| 2.1.9 Keberadaan KAP <i>Big Four</i> | 27 |
| 2.1.10 Kepemilikan Manajerial | 28 |
| 2.1.11 Kepemilikan Institusional..... | 29 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 30 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| 2.4 Hipotesis..... | 37 |
| 2.4.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit | 37 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.4.2 | Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit | 38 |
| 2.4.3 | Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit | 39 |
| 2.4.4 | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit | 39 |
| 2.4.5 | Pengaruh <i>Leverage</i> Perusahaan terhadap Kualitas Komite Audit | 40 |
| 2.4.6 | Pengaruh Keberadaan KAP <i>Big Four</i> terhadap Kualitas Komite Audit | 41 |
| 2.4.7 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit | 43 |
| 2.4.8 | Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Komite Audit | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 46 |
| 3.1 | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel | 46 |
| 3.1.1 | Variabel Dependen | 46 |
| 3.1.2 | Variabel Independen..... | 50 |
| 3.1.2.1 | Independensi Dewan Komisaris..... | 50 |
| 3.1.2.2 | Kompetensi Dewan Komisaris..... | 51 |
| 3.1.2.3 | Aktivitas Dewan Komisaris | 51 |
| 3.1.2.4 | Ukuran Dewan Komisaris | 52 |
| 3.1.2.5 | <i>Leverage</i> | 52 |
| 3.1.2.6 | Keberadaan KAP <i>Big Four</i> | 52 |
| 3.1.2.7 | Kepemilikan Manajerial..... | 53 |
| 3.1.2.8 | Kepemilikan Institusional | 53 |
| 3.1.3 | Variabel Kontrol..... | 54 |
| 3.1.3.1 | Ukuran Perusahaan..... | 54 |
| 3.2 | Populasi dan Sampel | 54 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data..... | 55 |
| 3.4 | Metode Pengumpulan Data..... | 55 |
| 3.5 | Metode Analisis | 55 |
| 3.5.1 | Statistik Deskriptif..... | 55 |
| 3.5.2 | Uji Asumsi Klasik | 56 |
| 3.5.2.1 | Uji Normalitas..... | 56 |
| 3.5.2.2 | Uji Multikolonieritas..... | 56 |
| 3.5.2.3 | Uji Heteroskedastisitas..... | 57 |
| 3.5.3 | Uji Hipotesis..... | 57 |
| 3.5.3.1 | Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 58 |
| 3.5.3.2 | Uji Statistik F | 59 |
| 3.5.3.3 | Uji Statistik T | 60 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 61 |
| 4.1 | Deskripsi Objek Penelitian..... | 61 |
| 4.2 | Analisis Data | 62 |

| | | |
|------------------------|---|----|
| 4.2.1 | Statistik Deskriptif..... | 62 |
| 4.2.2 | Pengujian Asumsi Klasik..... | 65 |
| 4.2.2.1 | Uji Normalitas..... | 65 |
| 4.2.2.2 | Uji Multikolonieritas..... | 66 |
| 4.2.2.3 | Uji Heteroskedastisitas..... | 67 |
| 4.2.3 | Analisis Regresi Linier..... | 70 |
| 4.2.3.1 | Koefisien Determinasi..... | 70 |
| 4.2.3.2 | Uji Statistik F..... | 71 |
| 4.2.3.3 | Uji Hipotesis..... | 71 |
| 4.3 | Intepretasi Hasil..... | 78 |
| 4.3.1 | Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit..... | 78 |
| 4.3.2 | Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit..... | 80 |
| 4.3.3 | Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit..... | 81 |
| 4.3.4 | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit..... | 82 |
| 4.3.5 | Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kualitas Komite Audit..... | 83 |
| 4.3.6 | Pengaruh Keberadaan KAP <i>Big Four</i> terhadap Kualitas Komite Audit..... | 84 |
| 4.3.7 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit..... | 86 |
| 4.3.8 | Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Komite Audit..... | 87 |
| 4.3.9 | Variabel Kontrol..... | 88 |
| 4.3.9.1 | Ukuran Perusahaan..... | 88 |
| BAB V PENUTUP..... | | 90 |
| 5.1 | Simpulan..... | 90 |
| 5.2 | Keterbatasan..... | 93 |
| 5.3 | Saran..... | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 94 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 98 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 32 |
| Tabel 4.1 Deskriptif Variabel Penelitian..... | 62 |
| Tabel 4.2 Deskriptif Variabel KAP..... | 62 |
| Tabel 4.3 Uji Normalitas..... | 66 |
| Tabel 4.4 Uji Multikolonieritas..... | 67 |
| Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Sebelum Transformasi | 68 |
| Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi..... | 69 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 70 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F..... | 71 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik T terhadap Tiap Indikator Kualitas Komite Audit | 72 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik T terhadap Kualitas Komite Audit (AC_QUAL)..... | 7 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| Lampiran A Hasil Tabulasi Data..... | 98 |
| Lampiran B Hasil Output SPSS | 119 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan komite audit saat ini telah menjadi bagian dari *good corporate governance*. Dalam mewujudkan *good corporate governance*, komite audit telah diwajibkan secara legal untuk dimiliki oleh banyak perusahaan di seluruh dunia. Kewajiban perusahaan untuk memiliki komite audit diterapkan sebagai tanggapan atas kasus perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan akibat kurangnya efektivitas penerapan *good corporate governance*. Salah satu contohnya, kasus yang terjadi pada Enron yang memiliki *corporate governance* lemah hampir di semua hal sehingga menyebabkan terjadinya kesepakatan konflik kepentingan yang dilakukan direksi *non-executive*. Akibat atas hal tersebut, komite audit gagal menampilkan fungsinya pada pengendalian internal dan pemantauan fungsi audit eksternal (Solomon dan Solomon, 2008).

Sebagai tanggapan terhadap runtuhnya perusahaan, terdapat rekomendasi yang dibuat oleh banyak kelompok mengenai beberapa karakteristik komite audit. Rekomendasi tersebut disarankan sebagai indikator efektivitas komite untuk mencapai tujuan dan kualitas komite audit perusahaan secara keseluruhan. Regulasi perusahaan, profesi akuntansi, dan kelompok lainnya membuat rekomendasi mengenai beberapa karakteristik seperti independensi, kompetensi, tingkat aktivitas dan ukuran

komite audit (e.g. Cadbury Committee, 1992; Price Waterhouse, 1993; Blue Ribbon Committee, 1999; KPMG, 1999; ASX Corporate Governance Council, 2003, 2007 dalam Baxter 2010). Dengan membuat rekomendasi tersebut, kelompok ini secara implisit berpendapat bahwa karakteristik independensi, kompetensi, tingkat aktivitas dan ukuran komite audit merupakan indikator dari kualitas komite audit.

Menurut Baxter (2010), kualitas komite audit dapat diperkuat dengan meningkatkan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran mereka. Independensi komite audit mencerminkan anggota komite yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan. Menurut KNKG (2006) yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Kompetensi akuntansi atau keuangan berhubungan dengan keahlian akuntansi, keuangan, dan audit yang dimiliki oleh komite audit. Tingkat aktivitas komite audit dilihat melalui jumlah rapat yang dilakukan komite audit selama periode satu tahun. Sedangkan ukuran komite audit mencerminkan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

Dalam mewujudkan *good corporate governance* di Indonesia, regulasi pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite audit. Kewajiban perusahaan publik di Indonesia untuk memiliki komite audit tertulis dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Di dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa

emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Hal tersebut tertulis pula pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2006 Pasal 2 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara* Pasal 70.

Menurut Peraturan Nomor: IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, serta manajemen risiko emiten dan perusahaan publik.

- g. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan.
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi internal dan eksternal audit serta manajemen risiko.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Beberapa faktor-faktor berikut ini diindikasikan berpengaruh terhadap kualitas komite audit. Faktor karakteristik dewan komisaris seperti independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran dewan komisaris merupakan faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, tugas dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris. Komite audit sebagai subkomite bertanggung jawab kepada dewan

komisaris. Oleh karena itu, dewan komisaris yang berkualitas diprediksi akan membentuk komite audit yang berkualitas pula dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Leverage merupakan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tingkat *leverage* perusahaan akan berpengaruh pada kualitas komite audit. *Leverage* yang lebih tinggi memiliki insentif yang lebih besar bagi manajemen dalam membuat pilihan kebijakan akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan mereka. Semakin meningkatnya tingkat *leverage*, maka dewan komisaris diperkirakan secara sukarela membentuk komite audit independen dengan kompetensi keuangan sebagai sarana meyakinkan *shareholder* dan *debtholders* bahwa komite audit secara efektif memantau proses pelaporan keuangan (Rainsbury, dkk., 2008)

KAP *Big Four* merupakan KAP yang sudah terkenal reputasinya di Indonesia bahkan di dunia. Ukuran KAP telah umum digunakan sebagai proksi untuk kualitas audit. Auditor yang memiliki klien audit dengan jumlah besar akan mengurangi insentif dalam berlaku curang untuk mempertahankan salah satu klien (DeAngelo, 1981). Oleh karena itu, kualitas auditor yang lebih tinggi diharapkan memiliki insentif yang lebih besar untuk mendorong klien mereka untuk meningkatkan kualitas komite audit melalui peningkatan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran komite audit.

Kepemilikan manajerial berpotensi mempengaruhi kualitas komite audit suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwa kenaikan kepemilikan

manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer pemilik saham dengan pemilik saham lainnya. Teori agensi memprediksi bahwa dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka akan menurunkan permintaan *monitoring* oleh komite audit (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter 2010).

Kepemilikan institusional diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Nuraini A. dan Sumarno Zain, 2007). Investor institusional akan melakukan *monitoring* lebih efektif pada perusahaan terutama pada laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan laba deviden yang mereka harapkan. Adanya *monitoring* dari investor institusional akan mendorong dewan komisaris untuk meningkatkan pengawasan perusahaan secara optimal. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya kepemilikan institusional diprediksi dewan komisaris akan membentuk komite audit yang berkualitas sebagai sarana meyakinkan para investor bahwa komite audit secara efektif memantau proses pelaporan keuangan perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit antara lain, Baxter (2010) menemukan hasil penelitian bahwa independensi, keahlian, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit, sedangkan aktivitas dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Five* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian Paramitha (2013)

menunjukkan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Baxter (2010) yang melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan di Australia. Penelitian tersebut menguji pengaruh independensi dewan direksi, kompetensi dewan direksi, aktivitas dewan direksi, ukuran dewan direksi, *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan juga kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa independensi dewan direksi, kompetensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas komite audit. Namun, tidak ditemukan pengaruh dari aktivitas dewan direksi, *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit pada perusahaan-perusahaan non keuangan di Australia.

Pada penelitian ini menambahkan kepemilikan institusional perusahaan sebagai variabel independen. Kepemilikan institusional ditambahkan sebagai variabel independen karena dengan adanya kepemilikan institusional diprediksi akan meningkatkan kualitas komite audit. Para investor institusional memiliki kesempatan, sumber daya, dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, terutama pada laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan laba deviden yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, kepemilikan institusional dengan jumlah yang besar akan mendorong

dewan komisaris meningkatkan pengawasan perusahaan dengan membentuk komite audit yang berkualitas. Selain itu, dewan direksi pada penelitian acuan Baxter (2010) digantikan dengan dewan komisaris pada penelitian ini. Hal tersebut dilakukan karena kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*) (KNKG, 2006).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masih perlu diadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Atas dasar tersebut, judul penelitian yang diajukan adalah “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit**”.

1.2. Rumusan Masalah

Kurangnya efektivitas *corporate governance* merupakan kunci kegagalan jatuhnya perusahaan besar, contohnya kasus pada perusahaan Enron. Perusahaan Enron memiliki *corporate governance* yang lemah hampir disemua hal sehingga menyebabkan terjadinya kesepakatan konflik kepentingan yang dilakukan direksi *non-executive*. Akibat atas hal tersebut, komite audit gagal untuk menampilkan fungsinya pada pengendalian internal dan pemantauan fungsi audit eksternal (Solomon dan Solomon, 2008). Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan *good corporate governance*, dewan komisaris diwajibkan membentuk komite audit. Kualitas komite audit suatu perusahaan diharapkan dapat membantu dewan komisaris

dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagai upaya melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perseroan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yaitu adanya perbedaan hasil penelitian antara Baxter (2010) dan Paramitha (2013) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Baxter (2010) menemukan bahwa independensi, keahlian, dan ukuran dewan direksi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit, sedangkan aktivitas dewan direksi, *leverage*, keberadaan KAP *Big Five* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas komite audit. Pada penelitian Paramitha (2013) menunjukkan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit. Berdasarkan *research gap* tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Selain itu, penelitian ini perlu dilakukan, mengingat penelitian yang menguji kualitas komite audit sebagai variabel dependen di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- b. Apakah kompetensi dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas komite audit?

- c. Apakah aktivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- d. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- e. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- f. Apakah keberadaan KAP *Big Four* berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- g. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- h. Apakah kepemilikan institusional perusahaan berpengaruh terhadap kualitas komite audit?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kualitas komite audit.
- b. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi dewan komisaris terhadap kualitas komite audit.
- c. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh aktivitas dewan komisaris terhadap kualitas komite audit.
- d. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas komite audit.

- e. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap kualitas komite audit.
- f. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh keberadaan KAP *Big Four* terhadap kualitas komite audit.
- g. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit.
- h. Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas komite audit.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penelitian tersebut. Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi regulator, sebagai wacana mengenai pentingnya pengawasan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh komite audit.

2. Bagi manajemen, sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya memiliki komite audit yang berkualitas guna menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.
3. Bagi investor, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menilai baik-buruknya tata kelola perusahaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian ini akan disajikan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi mengenai penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi penjelasan setelah penelitian dilakukan yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data beserta interpretasi hasilnya.

BAB V : PENUTUP

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi, implikasi dan keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Pihak agen melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal sedangkan pihak prinsipal memberi imbalan pada pihak agen sesuai kontrak yang disepakati (Hendriksen, 2001). Di dalam perusahaan, pihak agen dianalogikan sebagai manajer perusahaan sedangkan pihak prinsipal adalah sebagai pemilik atau pemegang saham.

Dalam teori keagenan, prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham menyediakan fasilitas-fasilitas dan dana yang dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Sedangkan agen sebagai manajer merupakan pengelola perusahaan yang berkewajiban menjalankan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dengan menciptakan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan harapan pemilik. Manajer cenderung berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang ditanggung oleh pihak lain yaitu para pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problem*. *Agency problem* ini terjadi karena adanya informasi yang tidak lengkap atau biasanya dikenal sebagai asimetri informasi. Hendriksen (2001) menyebutkan permasalahan yang terkait asimetri informasi, antara lain :

1. *Moral hazard*, yaitu suatu situasi yang terjadi bila pemilik tidak dapat mengamati semua aksi manajer, sehingga aksi-aksi ini mungkin berbeda dari aksi yang disukai pemilik. Manajer sengaja mencoba untuk melalaikan tugas atau menipu prinsipal.
2. *Adverse selection*, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh asimetri informasi, yaitu informasi yang tidak lengkap, keadaan ketika tidak semua kondisi diketahui oleh kedua belah pihak.

Agency problem dapat berdampak pada pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan. Konflik tersebut dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan antara agen dan prinsipal. Namun, dengan munculnya mekanisme pengawasan akan menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya agensi (*agency cost*). Menurut Fama dan Jensen (1983), biaya agensi timbul dari pemisahan kepemilikan dan manajemen dalam perusahaan modern. Biaya ini hasil dari hubungan antara perusahaan, pemegang saham dan *debtholders*. Berbagai mekanisme *monitoring* dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan dengan membatasi kegiatan kepentingan pribadi

manajemen yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam pelaksanaan *good corporate governance*, dewan komisaris sebagai pengendali internal tertinggi bertugas untuk mengawasi kegiatan manajemen. Dalam menjalankan tugas tersebut, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu tugasnya sebagai pengawas perusahaan. Komite audit merupakan bagian dari mekanisme *monitoring* yang memainkan peranan penting dalam mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Dengan demikian, komite audit berwenang dalam *monitoring* pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen sebagai pengguna internal tentunya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan perusahaan dibanding pemegang saham. Keadaan ini memicu terjadinya asimetri informasi, dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen dengan pemegang saham. Dengan adanya komite audit, maka pengawasan terhadap manajemen akan meningkat sehingga diharapkan dapat mengatasi munculnya asimetri informasi tersebut. Ketika asimetri informasi berkurang, maka *agency cost* yang ditanggung prinsipal pun akan berkurang (Paramitha, 2013).

2.1.2 Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, *good corporate governance* dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Asas–asas yang harus dipenuhi dalam *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (KNKG, 2006).

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai perseroan bagi para pemangku kepentingan, seperti kreditor, investor, pemerintah dan lain-lain. Bagi kreditor berguna dalam pengambilan keputusan untuk meminjamkan dananya atau tidak. Bagi investor berguna dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, tidak berinvestasi atau meneruskan kerja sama dengan perseroan. Bagi pemerintah untuk menilai kepatuhan perseroan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bagi perseroan bermanfaat dalam pengendalian internal perseroan (Wahyuni, 2012).

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka salah satu mekanisme *good corporate governance* yang dilakukan adalah dengan membentuk komite audit. Tugas komite audit adalah membantu tugas dan tanggungjawab dewan komisaris dalam pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, jika

pengawasan di dalam perusahaan meningkat, maka diharapkan dapat meningkat pula penerapan *good corporate governance*.

2.1.3 Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.

Dalam mewujudkan *good corporate governance*, keberadaan komite audit telah diwajibkan untuk dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Hal tersebut telah tertulis dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Di dalam ketentuan peraturan tersebut tertulis bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Oleh karena itu, emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam Komite Audit (*audit committee charter*), yang paling kurang memuat:

- a. tugas dan tanggung jawab serta wewenang
- b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
- c. tata cara dan prosedur kerja
- d. kebijakan penyelenggaraan rapat
- e. sistem pelaporan kegiatan

- f. ketentuan mengenai penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, serta manajemen risiko emiten dan perusahaan publik.
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan.
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi internal dan eksternal audit serta manajemen risiko.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Kualitas komite audit diukur melalui empat proksi, yakni independensi, kompetensi akuntansi atau keuangan, aktivitas, dan ukuran komite audit yang ketentuannya telah tercantum dalam dalam Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit* sebagai berikut:

- a. Persyaratan Anggota Komite Audit.
 1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa attestasi, jasa non-attestasi, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten dan Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.

3. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.
 4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau perusahaan Publik Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama atau Perusahaan Publik.
 5. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
 6. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit.
1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota. sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar emiten dan perusahaan publik.
- c. Kewajiban anggota komite audit.

2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 3. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan.
- e. Rapat Komite Audit.
1. Komite audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 2. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
 3. Keputusan rapat komite audit diambil berdasar musyawarah untuk mufakat.
 4. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

2.1.4 Independensi Dewan Komisaris

Pengertian komisaris independen menurut UU No 40 tahun 2007 adalah komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 yaitu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota komisaris. Syarat komisaris independen menurut keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012, komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

1. Berasal dari luar perusahaan
2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada perusahaan dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Independensi dewan komisaris diukur dari persentase komisaris independen dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang ada di dalamnya. *The Institute of Internal Auditors (IIA)* merekomendasikan bahwa komite audit agar beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2002). Dengan semakin besar persentase anggota dewan komisaris independen, semakin mudah bagi dewan untuk memiliki komite audit independen. Oleh karena itu, semakin tinggi independensi dewan komisaris diharapkan dapat membentuk komite audit yang berkualitas sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

2.1.5 Kompetensi Dewan Komisaris

Menurut Pasal 28 Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, ayat (1) berbunyi: Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dilihat bahwa untuk menjadi dewan komisaris perlu memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis sehingga memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen dan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan.

Cadbury Report (1992) menyatakan bahwa kompetensi anggota dewan komisaris merupakan hal yang sangat penting agar dapat menghasilkan dewan komisaris yang efektif. Kompetensi yang dibutuhkan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan peran *monitoring*-nya adalah pengetahuan mengenai bidang usaha perusahaan dan pemahaman mengenai proses *corporate governance* (Wiwiek, dkk., 2007). Oleh karena itu, dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis diprediksi akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan.

2.1.6 Aktifitas Dewan Komisaris

Aktivitas dewan komisaris diukur dari jumlah rapat yang dilaksanakan selama periode satu tahun. Pada umumnya, dewan komisaris mengadakan pertemuan secara berkala sekali dalam sebulan, triwulanan atau paling sedikit sekali dalam empat bulan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan untuk membahas pekerjaan terkait tugas dan tanggung jawab mereka, maka diharapkan bahwa kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin baik (Paramitha, 2013). Dengan demikian, tingkat pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* semakin meningkat.

2.1.7 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dari dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002, dinyatakan bahwa komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta

dapat bertindak secara independen. Menurut KNKG (2006) jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris juga harus disesuaikan dengan ukuran dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris setidaknya harus lebih besar atau minimal sama dengan jumlah anggota dewan direksi, karena apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dibanding jumlah anggota dewan direksi, maka akan terdapat kemungkinan anggota dewan komisaris mendapat tekanan psikologis jika ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak (Indrayati, 2010). Jika ukuran dewan komisaris terlalu kecil, mungkin akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah.

2.1.8 Leverage

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Rasio *leverage* menunjukkan besarnya modal yang berasal dari pinjaman (modal asing) yang dipergunakan untuk membiayai investasi dan operasional perusahaan (Bestivano, 2013). Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang maka semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan.

2.1.9 Keberadaan KAP Big Four

KAP *Big Four* merupakan KAP bertaraf Internasional yang sudah terkenal reputasi dan kualitas auditnya. Menurut Firth & Liao Tan (1998) dalam Wibowo dan

Rossieta (2008), kualitas audit sering dikaitkan dengan skala auditor yang dipandang mempunyai kelebihan dalam empat hal yaitu:

1. Besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP
2. Banyaknya ragam jasa yang ditawarkan
3. Luas dan cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional
4. Banyaknya jumlah staf audit dalam suatu KAP

KAP *Big Four* memiliki reputasi yang baik serta mendapatkan kepercayaan oleh semua pihak karena memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dan mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Di Indonesia, KAP yang termasuk kedalam daftar *Big Four* adalah :

1. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E&Y)
2. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC)
3. KAP Osman Bing Satrio & Eni yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
4. KAP Sidharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

2.1.10 Kepemilikan Manajerial

Gunarsih & Bambang (2008) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Salah satu mekanisme pengawasan

internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh & Seward, 1990 dalam Ujiyantho dan Bambang, 2007). Kontrak jangka panjang dilakukan dengan memberikan insentif kepada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen & Meckling, 1976). Dengan demikian manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan pemegang. Ross, dkk. (1999) dalam Tarjo (2002) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri.

2.1.11 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Dalam hubungannya dengan fungsi *monitoring*, kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik dari pada kepemilikan individu (Hartas, 2011).

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi dalam jumlah besar, maka semakin besar pula *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi. Adanya *monitoring* dari investor institusional akan mendorong dewan komisaris untuk meningkatkan pengawasan perusahaan secara optimal. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya kepemilikan institusional akan memotivasi dewan komisaris untuk membentuk komite audit yang berkualitas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sutaryo, dkk. (2010) melakukan penelitian terhadap 151 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji faktor-faktor penentu frekuensi rapat komite audit. Faktor-faktor yang diuji antara lain ukuran perusahaan, *leverage* perusahaan, pertumbuhan perusahaan, rugi perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor, ukuran komite audit, keahlian akuntansi anggota komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris independensi dewan komisaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* perusahaan, rugi perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor berpengaruh signifikan sebagai penentu frekuensi rapat komite audit. Sedangkan faktor-faktor lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap penentu frekuensi rapat komite audit.

Baxter (2010) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Australian Securities Exchange (ASX). Penelitian ini menguji apakah faktor-faktor seperti independensi dewan direksi, kompetensi dewan direksi, aktivitas dewan direksi, ukuran dewan direksi, *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas komite audit. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini, kualitas komite audit diproksikan dengan independensi, kompetensi, aktivitas, dan ukuran komite audit itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas komite audit, sedangkan *leverage*,

keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas komite audit.

Adelopo, dkk. (2012) melakukan penelitian terhadap 350 perusahaan yang terdaftar di London Stock Exchange. Penelitian ini menguji faktor-faktor penentu aktivitas komite audit. Faktor-faktor yang diuji antara lain ukuran dewan direksi, proporsi direksi independen, frekuensi pertemuan dewan direksi, kompetensi komite audit, piagam charter komite audit, jumlah anggota komite, dan struktur kepemilikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi direksi independen dan frekuensi pertemuan dewan direksi berpengaruh signifikan dalam menentukan aktivitas komite audit. Sedangkan ukuran dewan direksi, kompetensi komite audit, piagam charter komite audit, jumlah anggota komite, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan.

Paramitha (2013) melakukan penelitian terhadap 78 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Penelitian ini menguji apakah faktor-faktor seperti karakteristik dewan komisaris (independensi, kompetensi, aktivitas, ukuran), *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas komite audit. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit. Penelitian-penelitian terdahulu secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti dan Tahun | Metodologi | Variabel | Hasil |
|----|----------------------|------------------|--|--|
| 1. | Sutaryo, dkk. (2010) | Regresi Berganda | <p>Variabel dependen: frekuensi rapat komite audit</p> <p>Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i> perusahaan, pertumbuhan perusahaan, rugi perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor, ukuran komite audit, keahlian akuntansi anggota komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris independensi dewan komisaris</p> | <p>Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> perusahaan, rugi perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor berpengaruh signifikan sebagai penentu frekuensi rapat komite audit. Sedangkan Pertumbuhan perusahaan, ukuran komite audit, keahlian akuntansi anggota komite audit, independensi komite audit, ukuran dewan komisaris independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penentu frekuensi rapat komite audit. tidak berpengaruh signifikan terhadap penentu frekuensi rapat komite audit.</p> |
| 2. | Baxter, (2010) | Regresi Berganda | <p>Variabel dependen: Kualitas komite audit</p> <p>Variabel independen: independensi dewan direksi, kompetensi dewan direksi, aktivitas dewan direksi, ukuran dewan direksi, <i>leverage</i>, keberadaan <i>KAP Big Five</i>, dan kepemilikan manajerial.</p> | <p>Independensi, kompetensi, ukuran dewan direksi, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas komite audit, sedangkan <i>leverage</i>, keberadaan <i>KAP Big Five</i>, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas komite audit.</p> |

| | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|---|---|
| | | | Variabel kontrol: ukuran perusahaan | |
| 3. | Adelopo, dkk. (2012) | Regresi Berganda | Variabel dependen: Aktivitas komite audit Variabel independen: ukuran dewan direksi, proporsi direksi independen, frekuensi pertemuan dewan direksi, kompetensi komite audit, piagam charter komite audit, jumlah anggota komite, dan struktur kepemilikan. | Proporsi direksi independen dan frekuensi pertemuan dewan direksi berpengaruh signifikan dalam menentukan aktivitas komite audit. Sedangkan ukuran dewan direksi, kompetensi komite audit, piagam charter komite audit, jumlah anggota komite, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan. |
| 4. | Paramitha, (2013) | Regresi Berganda | Variabel dependen: Kualitas komite audit Variabel independen: karakteristik dewan komisaris (independensi, kompetensi, aktivitas, ukuran), <i>leverage</i> , keberadaan KAP <i>Big Five</i> , dan kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan | <i>Leverage</i> secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP <i>Big Four</i> , kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit. |

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Baxter (2010) yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit pada perusahaan non keuangan di Australia. Sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menambahkan kepemilikan institusional perusahaan sebagai variabel independen. Kepemilikan institusional dimasukkan sebagai variabel independen karena dengan adanya kepemilikan institusional

diprediksi akan meningkatkan kualitas komite audit. Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Nuraini A. dan Sumarno Zain, 2007). Oleh sebab itu, kepemilikan institusional dengan jumlah yang besar akan mendorong dewan komisaris meningkatkan pengawasan perusahaan dengan membentuk komite audit yang berkualitas.

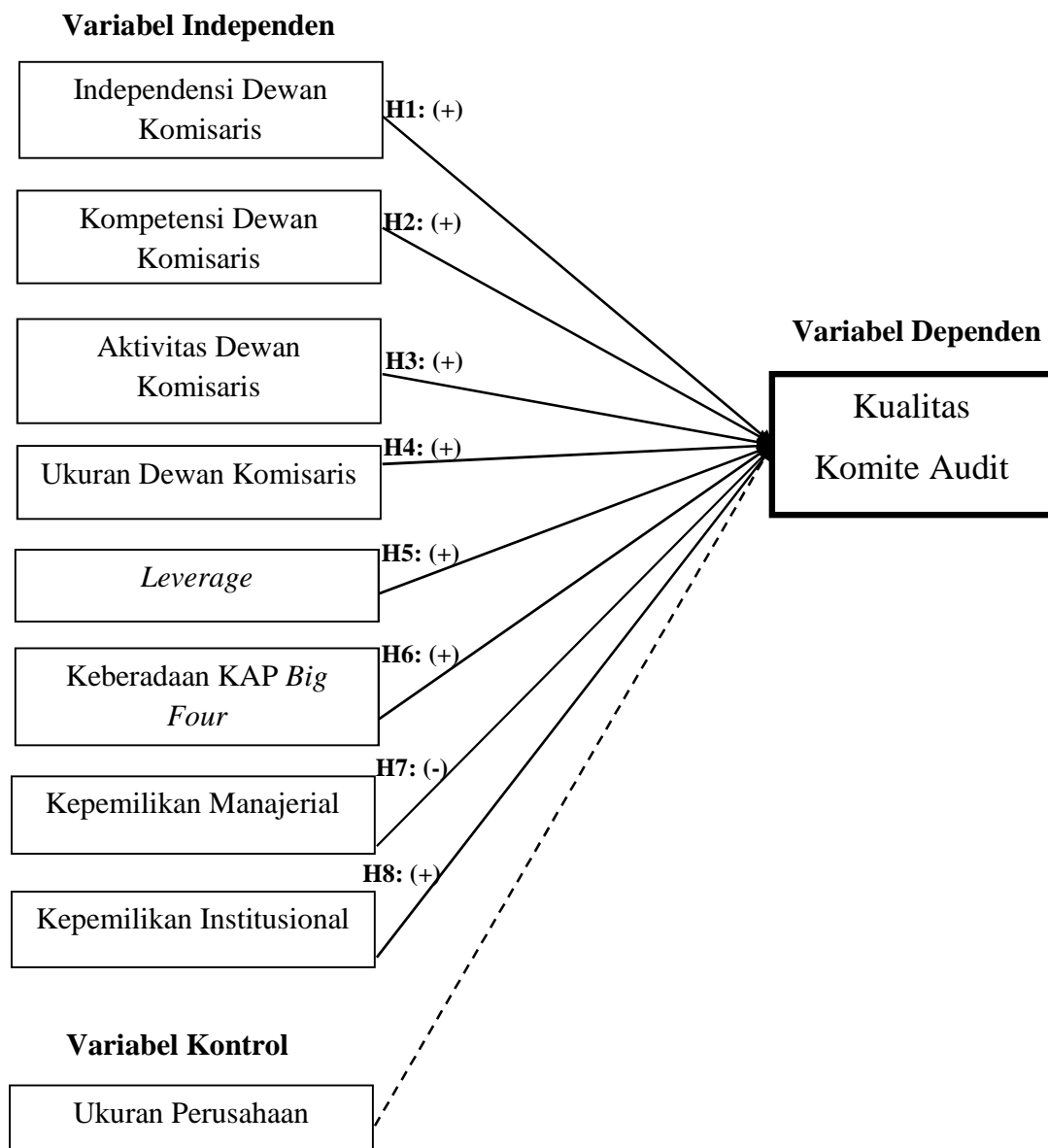
2.3 Kerangka Pemikiran

Lemahnya efektivitas *corporate governance* merupakan kunci kegagalan jatuhnya perusahaan besar, contohnya kasus pada perusahaan Enron. Perusahaan Enron memiliki *corporate governance* yang lemah hampir di semua hal sehingga menyebabkan terjadinya kesepakatan konflik kepentingan yang dilakukan direksi *non-executive*. Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan *good corporate governance*, dewan komisaris diwajibkan membentuk komite audit. Kualitas komite audit suatu perusahaan diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagai upaya melindungi para pemangku kepentingan dan mencapai tujuan perseroan. Oleh karena itu, jika pengawasan di dalam perusahaan meningkat, maka diharapkan dapat meningkat pula penerapan *good corporate governance*.

Penelitian ini bertujuan menguji dan menemukan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris,

aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, *leverage*, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen serta penggunaan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas komite audit. Untuk memberikan gambaran tentang hubungan tersebut, dibuat sebuah bagan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian yang diturunkan dari hipotesis. Gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit

Dewan komisaris dipandang sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perusahaan, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu tugas dan fungsinya.

The Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa komite audit agar beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2002). Komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi oleh perusahaan sehingga dalam pelaksanaan tugasnya akan fokus dan objektif pada pengawasan perusahaan. Dengan jumlah dewan komisaris independen dan ukuran dewan meningkat, maka dewan komisaris independen juga memiliki insentif dan kemampuan untuk memperkuat komite audit mereka dengan menambahkan *outside directors* untuk komite (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter, 2010). Argumen ini didukung oleh Klein (2002) yang menyatakan bahwa semakin besar kelompok *outside directors*, semakin mudah bagi dewan untuk memiliki komite audit independen. Tingkat kompetensi keuangan dan independensi dewan meningkat, ada insentif yang lebih besar dan kemampuan untuk meningkatkan

kompetensi keuangan secara keseluruhan dari komite audit (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter 2010). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₁: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit

Cadbury Report (1992) menyatakan bahwa kompetensi anggota dewan komisaris merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan dewan komisaris yang efektif. Kompetensi yang dibutuhkan oleh dewan komisaris dalam melaksanakan peran *monitoring*-nya adalah pengetahuan mengenai bidang usaha perusahaan dan pemahaman mengenai proses *corporate governance* (Wiwiek dkk., 2007). Dengan demikian, dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis diprediksi akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di perusahaan. Salah satunya, pengawasan dewan komisaris kepada komite audit terkait tugas komite audit dalam menelaah laporan keuangan. Oleh karena itu, dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis diprediksi akan membentuk komite audit yang berkualitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Beasley dan Salterio (2001) dalam Baxter (2010) bahwa tingkat kompetensi keuangan dan independensi dewan meningkat, ada insentif yang lebih besar dan kemampuan untuk meningkatkan kompetensi keuangan secara keseluruhan dari komite audit. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₂: Kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit

2.4.3 Pengaruh Aktifitas Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit

Menurut FCGI (2002) dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dalam rangka menjalankan tugas dalam mekanisme pengawasan, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan manajemen dan dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Dengan demikian, frekuensi rapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perseroan lebih intensif (Wahyuni, 2012). Cotter dkk. (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi pertemuan dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris, relevan, dan tepat waktu terutama tentang risiko serta kualitas pengendalian internal yang lebih baik. Selain itu, frekuensi pertemuan dewan menandakan aktivitasnya dan dapat menunjukkan ukuran efektivitas dan ketekunan (Adelopo, dkk., 2012). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan semakin efektif dalam pengawasan tata kelola perusahaan salah satunya pengawasan dalam kinerja komite audit. Semakin aktif dewan komisaris, maka semakin aktif pula komite audit sebagai subkomite dewan komisaris. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃: Aktifitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit

2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audi

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Oleh karena itu komite audit adalah subkomite dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Dewan yang lebih besar seharusnya memperoleh manfaat lebih besar memantau efektifitas komite daripada dewan yang lebih kecil (Collier dan Gregory, 1999). Hal ini mencerminkan efisiensi operasional diperoleh dari pembagian tanggung jawab dewan tertentu kepada komite audit. Klein (2002) menyatakan bahwa independensi komite audit meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dewan dan independensi dewan. Oleh karena itu, komite audit yang dibentuk oleh dewan yang lebih besar seharusnya lebih aktif dan independen daripada yang dibentuk oleh dewan yang lebih kecil (Menon dan Williams, 1994). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₄: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.

2.4.5 Pengaruh *Leverage* terhadap Kualitas Komite Audit

Ketika perusahaan melakukan *debt financing*, potensi konflik kepentingan muncul antara pemegang saham dan *debtholders* yang menimbulkan biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Oleh sebab itu, saat melakukan *debt financing*, perusahaan biasanya membuat suatu perjanjian atau kontrak utang.

Kontrak utang tersebut berguna untuk mengurangi konflik antara *shareholders* dan *debtholders* serta memantau tindakan manajemen dalam perusahaan.

Dalam kontrak utang, biasanya perusahaan diminta menyertakan laporan keuangan yang telah diaudit (Smith and Warner, 1979). Namun, manajer perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk membuat pilihan kebijakan akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari biaya pelanggaran perjanjian utang. Dalam situasi seperti itu, maka dapat menurunkan kepercayaan pemegang saham dan *debtholders*. Oleh karena itu, perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan pengawasan proses pelaporan keuangan dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan *debtholders*. Saat *leverage* meningkat, dewan komisaris diperkirakan secara sukarela membentuk komite audit independen dengan kompetensi keuangan sebagai sarana meyakinkan *debtholders* bahwa komite audit secara efektif memantau proses pelaporan keuangan (Rainsbury, dkk., 2008). Dengan demikian, di saat perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi maka perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan dengan membentuk komite audit yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₅: *Leverage* berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.

2.4.6 Pengaruh Keberadaan KAP *Big Four* terhadap Kualitas Komite Audit

KAP *Big Four* merupakan KAP yang sudah terkenal reputasi dan kualitas auditnya di Indonesia bahkan di mata Internasional. Ukuran KAP telah umum digunakan sebagai proxy untuk pemeriksaan kualitas audit. Kualitas auditor yang

lebih tinggi ditentukan oleh ukuran mereka karena mereka memiliki basis klien yang lebih besar. Auditor yang lebih besar akan cenderung kehilangan klien mereka jika reputasi yang dimilikinya hilang (Becker dkk., 1998 dalam Baxter, 2010). Hilangnya reputasi dapat terjadi jika masyarakat mengenal auditor berhubungan dengan klien yang terlibat dalam manajemen laba yang mengurangi kualitas laporan keuangan mereka (Baxter, 2010). Potensi besar kerugian bagi auditor yang memiliki kualitas yang lebih tinggi menciptakan insentif yang relatif lebih besar untuk tetap independen dari klien mereka dibandingkan dengan auditor yang berkualitas lebih rendah yang memiliki banyak basis klien yang lebih kecil (Becker dkk., 1998 dalam Baxter, 2010). Auditor yang memiliki jumlah klien yang besar akan mengurangi insentif untuk bertindak curang guna mempertahankan salah satu klien (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan pelanggaran dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* yang memiliki kualitas audit yang lebih tinggi diharapkan memiliki insentif yang lebih besar untuk mendorong klien mereka untuk memperkuat kualitas komite audit guna mengawasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen perusahaan melalui peningkatan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran komite audit. Selain itu, menurut Sutaryo (2010), apabila perusahaan menggunakan jasa auditor dalam kelompok *Big Four* cenderung lebih banyak melakukan interaksi dan komunikasi dengan komite audit perusahaan dalam rapat komite audit, sehingga meningkatkan

frekuensi rapat komite audit perusahaan. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₆: Keberadaan KAP *Big Four* berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.

2.4.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit

Dalam teori agensi menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham sebagai akibat dari pemisahan kepemilikan dan manajemen. Peningkatan kepemilikan manajerial akan mengurangi konflik keagenan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer, maka manajer akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya dan akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Dengan demikian, kepemilikan saham oleh manajer merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut didukung oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa meningkatkan kepemilikan ekuitas oleh manajemen dapat mengurangi konflik keagenan tersebut, dengan demikian meningkatkan keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Oleh karena itu, teori keagenan memprediksi bahwa, karena tingkat kepemilikan manajerial meningkat, ada penurunan permintaan pengawasan oleh komite audit (Beasley dan Salterio, 2001 dalam Baxter 2010). Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₇: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kualitas komite audit.

2.4.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Komite Audit

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Investor institusional merupakan salah satu kekuatan mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat memonitor manajemen. Dalam hubungannya dengan fungsi *monitoring*, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Pemegang saham institusional memiliki insentif untuk *monitoring* secara ketat terhadap manajemen dan menuntut mekanisme yang efektif dalam memastikan tata kelola perusahaan dilaksanakan (Shleifer dan Vishny, 1986; Smith, 1996). Shiller dan Pound (1989) dalam Fidyati (2004) menjelaskan bahwa investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan *monitoring* lebih efektif dan lebih menekankan pada laporan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan laba deviden yang mereka harapkan.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi dalam jumlah besar, maka semakin besar pula *monitoring* yang dilakukan oleh investor institusi. Adanya *monitoring* dari investor institusional akan mendorong dewan komisaris untuk meningkatkan pengawasan perusahaan secara optimal. Oleh sebab itu, dengan bertambahnya kepemilikan institusional akan memotivasi dewan komisaris untuk

membentuk komite audit yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₈: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite audit (AC_QUAL) yang diproksikan dengan empat indikator yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, kompetensi akuntansi atau keuangan yang dimiliki anggota komite audit serta aktivitas komite audit. Untuk menyediakan pengukuran yang lebih komprehensif, maka indikator-indikator tersebut dijadikan satu menjadi variabel tunggal yaitu kualitas komite audit (AC_QUAL). Pendekatan ini digunakan juga pada penelitian Baxter (2010) dan Paramitha (2013). Variabel kualitas komite audit (AC_QUAL) diukur dengan memberikan skor *dummy* pada keempat indikator sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya skor *dummy* dijumlahkan sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4. Berikut kriteria pemberian skor *dummy* :

a. Independensi Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 independensi setiap anggota ditentukan:

1. Berasal dari luar perusahaan.

2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada perusahaan dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit* bahwa komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang yang sebagian besar adalah anggota independen. Dalam penelitian ini independensi komite audit diketahui melalui persentase anggota komite audit yang independen terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit. Semakin besar persentase anggota komite audit yang independen diprediksi komite audit akan lebih independen dalam melakukan pengawasan perusahaan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit bersifat independen. Sebaliknya, nilai 0 diberikan jika anggota komite audit yang bersifat independen jumlahnya lima puluh persen atau kurang, dari keseluruhan anggota (Baxter, 2010).

b. Kompetensi Komite Audit

Dalam keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 disebutkan bahwa paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Komponen penelitian ini dinilai dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Anggota komite audit yang dianggap memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan adalah anggota dengan latar belakang pendidikan minimal setingkat sarjana dengan jurusan akuntansi atau keuangan (Paramitha, 2013). Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan anggota komite audit ditentukan melalui gelar yang dimilikinya. Kompetensi akuntansi dan keuangan anggota komite audit ini diketahui melalui persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dari keseluruhan anggota komite audit. Semakin besar persentase anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi akuntansi atau keuangan diharapkan diprediksi dapat meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukan oleh komite audit (Paramitha, 2013). Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit yang memiliki latar belakang sesuai kualifikasi di atas dan nilai 0 jika lima puluh persen atau kurang dari lima puluh persen (Baxter, 2010).

c. Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit selama periode satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung

jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pada umumnya perusahaan mengadakan rapat setidaknya empat bulan sekali atau minimal tiga kali dalam setahun. Semakin banyak pertemuan yang diadakan berarti semakin sering pula pihak-pihak dalam perusahaan melakukan koordinasi yang diprediksi dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan termasuk dalam hal pengawasan (Paramitha, 2013). Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit mengadakan rapat lebih dari tiga kali dalam setahun, nilai 0 diberikan jika komite audit hanya menyelenggarakan rapat tiga kali atau kurang dari tiga kali dalam setahun (Baxter, 2010).

d. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012, komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dimana sebagian besar anggota komite audit merupakan komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit maka semakin banyak pula sumber informasi dan pengetahuan yang dimiliki sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang semakin baik dan objektif pula (Paramitha, 2013). Sehingga, ukuran komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*,

dimana nilai 1 diberikan jika komite audit beranggotakan lebih dari tiga orang, nilai 0 jika jumlah anggota komite audit sebanyak tiga orang atau kurang (Baxter, 2010).

Sesuai dengan penelitian Baxter (2010), variabel dependen yang berupa kualitas komite audit (AC_QUAL) dihitung dengan menjumlahkan skor yang diperoleh keempat indikator kualitas audit. Sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4.

3.1.2. Variabel Independen

3.1.2.1. Dewan Komisaris Independen (BCIND)

Menurut UU No 40 tahun 2007 komisaris independen adalah komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan menurut keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012, syarat komisaris independen antara lain:

1. Berasal dari luar perusahaan
2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada perusahaan dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.

5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam penelitian ini, independensi dewan komisaris dinyatakan dalam presentase jumlah anggota komisaris yang diklasifikasikan sebagai independen (Baxter, 2010).

$$BDIND = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.1.2.2. Kompetensi Dewan Komisaris (BCEXP)

Kompetensi dewan komisaris di bidang ekonomi dan bisnis adalah anggota dewan komisaris yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi dan bisnis dengan jenjang minimal sarjana. Dalam penelitian ini latar kompetensi dewan komisaris ditentukan melalui gelar yang dimilikinya. Kompetensi dewan komisaris diukur dengan presentase dewan komisaris yang memiliki kompetensi dibidang ekonomi dan bisnis (Baxter, 2010).

$$BDACCEXP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris memiliki kompetensi dibidang ekonomi dan bisnis}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.1.2.3. Aktivitas Dewan Komisaris (BCMEET)

Aktivitas dewan komisaris mencerminkan kegiatan pertemuan yang dilakukan dewan komisaris untuk mengawasi dan meninjau kebijakan-kebijan direksi dan manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan secara berkala sekali dalam sebulan, triwulanan atau paling sedikit sekali dalam empat bulan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan untuk membahas pekerjaan terkait tugas dan tanggung jawab mereka,

maka diharapkan bahwa kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin baik (Paramitha, 2013). Aktifitas dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan cara menjumlah frekuensi rapat yang dilaksanakan selama setahun (Baxter, 2010).

3.1.2.4. Ukuran Dewan Komisaris (BCSIZE)

Ukuran dewan komisaris mencerminkan jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut KNKG (2006) jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan cara menjumlah total anggota dari dewan komisaris (Baxter, 2010).

3.1.2.5. Leverage (LEV)

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Dalam penelitian ini *leverage* dihitung dengan cara membagi total utang dengan total aset (Baxter, 2010).

$$LEV = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.2.6. Keberadaan KAP *Big Four* (KAP)

KAP *Big Four* merupakan KAP besar dan memiliki reputasi yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan lebih daripada KAP non *Big Four*. KAP *Big Four* dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dan mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Di Indonesia, KAP yang termasuk ke dalam daftar KAP *Big Four* adalah :

1. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E&Y)
2. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC)
3. KAP Osman Bing Satrio & Eni yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
4. KAP Sidharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *Big Four* diberi nilai 0 (Baxter, 2010).

3.1.2.7. Kepemilikan Manajerial (MGOWN)

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh para manajer di dalam suatu perusahaan seperti direksi dan komisaris non independen. Dalam penelitian ini besarnya kepemilikan manajerial diukur dengan cara menjumlahkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer, direktur dan komisaris non independen (Baxter, 2010).

3.1.2.8. Kepemilikan Institusional (INSOWN)

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Persentase kepemilikan saham institusional ini diperoleh dari presentase perbandingan lembar saham oleh pihak institusi dan total lembar saham beredar (Sutaryo, 2010).

3.1.3. Variabel Kontrol

3.1.3.1. Ukuran Perusahaan (LNSIZE)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari banyaknya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan variabel ini diukur dengan menghitung *Natural Log* total aset perusahaan (Baxter, 2010).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.

Sampel dalam penelitian ini adalah data perusahaan non keuangan yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*. Penentuan sampel penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus formula Babbie (1983) dalam Rizal (2001):

$$n = \frac{N \cdot pq}{(N - 1) \frac{B^2}{4} + pq}$$

Dimana :

n = ukuran sampel yang diinginkan

N = ukuran populasi

p = probable value = 0,5 (untuk meminimalkan risiko sampling)

q = 1-p = 0,5

B = *Bound of error* atau kelonggaran kesalahan diperkirakan berinterval range tidak lebih dari 10%

$$n = \frac{403 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(403 - 1) \frac{0.1^2}{4} + 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = \frac{100,75}{(402)0.0025 + 0.25}$$

$$n = 80,28 = 80 \text{ perusahaan}$$

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI <http://www.idx.co.id>.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter berupa laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh situs resmi BEI <http://www.idx.co.id>. yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan studi pustaka, dilakukan dengan mengolah literature-literature, artikel, jurnal dan media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), deviasi standar, varian, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2009). Mean menunjukkan nilai rata-rata dari data yang bersangkutan. Maksimum menunjukkan nilai terbesar, sedangkan minimum menunjukkan nilai terkecil. Deviasi standar memberikan informasi tentang

seberapa besar data bervariasi dari rata-rata. Analisis ini sekedar memberikan informasi mengenai data yang tersedia dan tidak digunakan untuk menguji hipotesis.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolenieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan membuat hipotesis :

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual tidak berdistribusi normal

Apabila angka probabilitas lebih dari 0,05 maka H_a ditolak, sehingga variabel ini terdistribusi secara normal.

3.5.2.1.2 Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolenieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance ≤ 0.1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 , maka model regresi terdapat multikolonieritas.

3.5.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser. Untuk mengetahui tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan dengan tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (Abs_Residual). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2009).

3.5.3 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara kualitas komite audit dengan variabel-variabel independennya. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$AC_QUAL_{k,t} = \alpha_{0t} + b_{0t}BCIND + b_{1t}BCEXP + b_{2t}BCMEET + b_{3t}BCSIZE + b_{4t}LEV + b_{5t}KAP + b_{6t}MGOWN + b_{7t}INSOWN + b_{8t}LNSIZE + e_t$$

α_{0t} : konstanta

- $AC_QUAL_{k,t}$: penjumlahan nilai variabel *dummy* dari keseluruhan indikator kualitas komite audit (independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran komite audit).
- $b_{0t}BCIND$: presentase jumlah anggota komisaris yang diklasifikasikan sebagai independen.
- $b_{1t}BCEXP$: presentase dewan komisaris yang memiliki kompetensi dibidang ekonomi dan bisnis.
- $b_{2t}BCMEET$: jumlah frekuensi rapat yang dilaksanakan selama setahun.
- $b_{3t}BCSIZE$: jumlah total anggota dari dewan komisaris.
- $b_{4t}LEV$: rasio utang terhadap total asset.
- $b_{5t}KAP$: keberadaan *Big Four* (variabel *dummy* : 1 untuk *Big Four* ; 0 untuk non *Big Four*).
- $b_{6t}MGOWN$: kepemilikan manajerial, diukur dari persentase ekuitas yang dimiliki oleh manajer.
- $b_{7t}INSOWN$: persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.
- $b_{8t}LNSIZE$: diukur dari *Natural Log* total aset perusahaan.
- e_t : eror.

Langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis model regresi melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji statistik t.

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*.

3.5.3.2 Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2009), uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana H_0 yang hendak diuji adalah apakah semua parameter sama dengan nol (semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan) dan hipotesis alternatifnya adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol H_A sama dengan nol (semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen). Kriteria pengambilan keputusannya :

1. H_0 diterima jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan ditolak jika nilai signifikansi $< 0,05$.
2. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.5.3.3. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Uji t dilakukan dengan membandingkan sig t dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila sig t < 0,05 maka H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2009).